

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara (UUD 1945 pasal 28 H dan UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan). Oleh karenanya setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya (Depkes RI,2009)

Pelayanan kesehatan menurut H L Blum merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan, dan perawatan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Kondisi pelayanan kesehatan sangat menunjang derajat kesehatan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Melalui pembangunan di bidang kesehatan diharapkan akan semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara memadai (Dinas Kesehatan, 2007)

Menyadari bahwa pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan setiap warga negara, maka pemerintah berupaya dari waktu ke waktu untuk menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia adalah penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Rumengan dkk, 2015).

Program jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial, prinsip ekuitas dan sistemnya berupa sistem gotong royong dimana peserta mampu dan sehat akan membantu peserta yang miskin dan sakit (UU NO 40/2004). Menurut data BPJS (2016), Jumlah peserta program JKN sampai tanggal 18 November 2016 berjumlah 170.954.111 orang. Peserta JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2012, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sedangkan yang termasuk peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iuran secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja menerima upah.

Puskesmas dalam sistem JKN memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS kesehatan. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang tersebar di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 9.601, terdiri dari 3.320 puskesmas perawatan dan 6.281 puskesmas non perawatan. Provinsi Sumatra Barat memiliki 263 Puskesmas dan 22 Puskesmas diantaranya

terdapat di Kota Padang. Puskesmas dalam implementasi di era JKN, harus menyiapkan pelayanan kesehatan sesuai kriteria teknis yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan seperti tercantum dalam PERMENKES no 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan Nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia, selain itu agar eksistensi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah tetap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, Pelayanan kesehatan yang ditawarkan BPJS Kesehatan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan non kesehatan yang bersifat menyeluruh. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan, sedangkan pelayanan non kesehatan yang bersifat menyeluruh terdiri dari akomodasi dan ambulans. Salah satu pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan yaitu pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Pelayanan Kesehatan yang ditawarkan BPJS Kesehatan khususnya di puskesmas tak sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun pelayanan kesehatan yang ditawarkan BPJS Kesehatan telah mencakup layanan preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Target Nasional Angka Utilisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Indonesia minimal 15% (Depkes,2005). Berdasarkan data Riskesdas 2013, Pemanfaatan atau Utilisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Indonesia hanya 10,4%, sedangkan di Sumatra Barat hanya 0,8% yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya persentase penduduk yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan .

Menurut penelitian Purba di Puskesmas Tarok (2013) mengatakan bahwa masyarakat dalam Pemanfaatan Puskesmas Tarok sebesar 13% dari seluruh responden, dan juga menurut penelitian Junaidi dkk (2014) menyatakan bahwa sebanyak 50% masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas Guguak Panjang sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Hal ini juga menunjukkan masih kurangnya angka pemanfaatan Puskesmas bagi penduduk di sekitar Puskesmas.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang, data kunjungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kota Padang yang Paling tinggi adalah Puskesmas Lubuk Buaya dengan 13,1%, sedangkan kunjungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang termasuk terendah adalah Puskesmas Pemancungan dengan kunjungan 2,4%. Data kunjungan pasien yang menggunakan kartu JKN di Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Pemancungan yaitu Bulan Oktober 2016 hanya 106 pasien, Bulan November menurun yaitu 89 pasien, Bulan Desember 112 Pasien, dan rata-rata kunjungan per hari di Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Pemancungan hanya 5-8 orang. Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas pemancungan termasuk yang sangat rendah di Puskesmas se-Kota Padang.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Anderson (1975) faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah seperti demografi, tingkat pendidikan, kepercayaan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, tingkat pengetahuan, persepsi dan penilaian terhadap keluhan penyakit dan sebagainya. Penelitian Rumengang dkk (2015) menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas pada era JKN

adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sistem JKN yang masih rendah yaitu sebanyak 23,5%. Masyarakat masih kurang mengetahui sistem dan pelayanan kesehatan sehingga kurang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Selain itu, penelitian dari Septianingrum dan ajeng tahun 2015 juga menunjukkan faktor yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada era JKN yaitu tingkat pengetahuan masyarakat rendah tentang JKN sebesar 66,7% di desa Sobokerjo ngemplak, Boyolali.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang JKN dengan utilisasi (pemanfaatan) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Wilayah Kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Adanya Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang JKN dengan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di wilayah kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan

tingkat pengetahuan masyarakat tentang JKN dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang JKN terkait Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di wilayah kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang.

2. Mengetahui Utilisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Pemancungan Kota Padang.

3. Mengetahui hubungan Pengetahuan Masyarakat tentang JKN dengan Utilisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Pemancungan Kota Padang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang JKN dengan utilisasi (pemanfaatan) pelayanan kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

2. Bagi Puskesmas

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Puskesmas khususnya dalam mengevaluasi efektifitas pelayanan



gigi dan mulut yang diberikan.

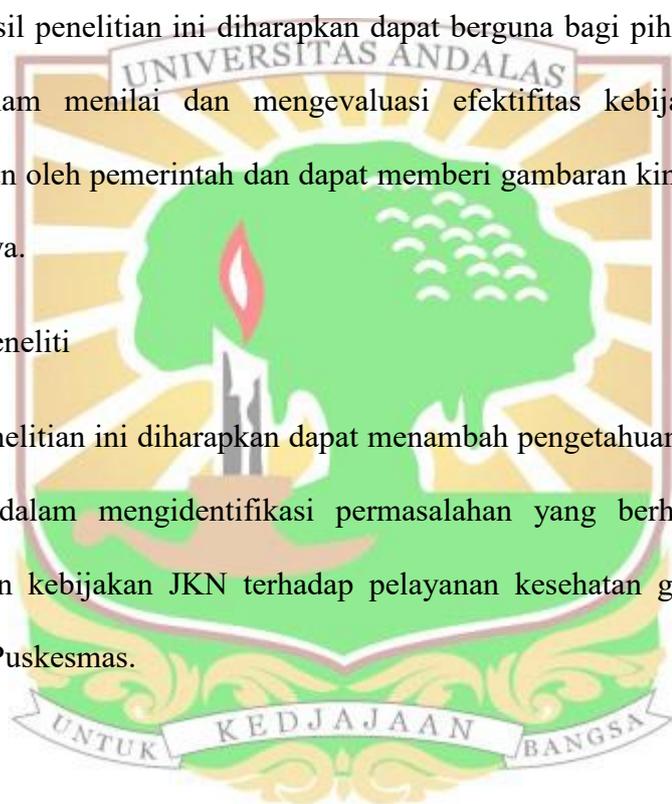
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Puskesmas untuk lebih meningkatkan kinerja baik dalam hal promosi maupun pelaksanaan program JKN khususnya untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

### 3. Bagi Penyelenggara JKN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak penyelenggara JKN dalam menilai dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan dapat memberi gambaran kinerja pada periode berikutnya.

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan penerapan kebijakan JKN terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut di lingkup Puskesmas.



## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang menggunakan asuransi kesehatan JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Pemancungan Kota Padang yaitu Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kelurahan Pasa Gadang, Kelurahan Batang Arau, dan Kelurahan Sabarang Palinggam.